



# DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3421>

## PELAKSANAAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MOJOMALANG MELALUI PENGUATAN UMKM

Anggraeny Puspaningtyas<sup>1</sup>, Radjikan<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[anggraenypuspa@untag-sby.ac.id](mailto:anggraenypuspa@untag-sby.ac.id)

### ARTICLE INFORMATION

#### Article history:

Received date: 24 September 2022

Revised date: 27 April 2023

Accepted date: 2 April 2023

### ABSTRACT

*Based on data from the Tuban Regency Cooperative, Industry and Trade Office in 2019, it reached 75,536 MSMEs. Ironically, in Mojomalang Village, Parengan District, there is not much motivation for residents to open their own businesses. The condition of the Mojomalang Village area which lacks water during the dry season. MSMEs in Mojomalang Village are still underdeveloped because of many obstacles including the lack of business capital, lack of understanding of how to grow a business, lack of product innovation, and difficulties in product marketing. In the rainy season, the majority of residents cultivate crops in rice fields and fields to meet their daily needs. However, in the dry season, residents do not cultivate rice fields and fields, but become factory workers. Collaborative governance is the concept of governance in Mojomalang Village in order to improve the village economy through strengthening MSMEs. The purpose of this study is to analyze the implementation of collaborative governance in improving the economy through strengthening MSMEs. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Based on the results of the research that has been carried out, the collaborative aspect of village government administration is more on the aspect of formulating and implementing policies or programs issued by the village government. So that in practice, collaboration in government administration can be said to be less deliberative or deliberation between actors / stakeholders who should be involved. The actors or stakeholders involved in efforts to improve the economy in Mojomalang Village are the village government, MSME actors, BUMDes managers and the community. Recommendations from the research that has been carried out is to develop village potentials that involve stakeholders through dissemination. Knowledge of superior product processing and the use of appropriate technology can increase MSME productivity and innovation. So that Mojomalang Village can become a village that has independent economic power.*

*Keywords: Collaborative governance; economy; village; MSME*

### ABSTRAKSI

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban tahun 2019 mencapai 75.536 UMKM. Ironinya, di Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan belum banyak motivasi warga untuk membuka usaha sendiri. Kondisi wilayah Desa Mojomalang yang kekurangan air di saat musim kemarau. UMKM di Desa Mojomalang masih kurang berkembang karena banyak kendala diantaranya minimnya modal usaha, kurang memahami cara membesarkan bisnis, kurangnya inovasi produk, dan kesulitan pemasaran produk. Pada musim penghujan, mayoritas warga bercocok tanam di sawah dan ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi, pada musim kemarau, warga tidak mengolah sawah dan ladang, tetapi menjadi buruh pabrik. Collaborative governance menjadi konsep penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mojomalang dalam rangka meningkatkan perekonomian desa melalui penguatan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam peningkatan perekonomian melalui penguatan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah desa lebih pada aspek perumusan dan implementasi kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Sehingga dalam prakteknya, kolaborasi penyelenggaraan pemerintah dapat dikatakan kurang deliberatif atau musyawarah antar aktor / stakeholders yang seharusnya terlibat. Adapun aktor atau stakeholders yang terlibat di dalam upaya peningkatan ekonomi di Desa Mojomalang adalah pemerintah desa, pelaku UMKM, pengelola BUMDes dan masyarakat. Rekomendasi dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah mengembangkan potensi desa yang melibatkan stakeholders dengan diseminasi. Pengetahuan mengenai pengolahan produk unggulan dan penggunaan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi UMKM. Sehingga Desa Mojomalang dapat menjadi desa yang memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri.

Kata Kunci: Collaborative governance; ekonomi; desa; UMKM

## PENDAHULUAN

Secara konsep, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Desa Mojomalang merupakan salah satu desa di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban yang memiliki empat dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Genengan, Dusun Dawung dan Dusun Alastuwo. Produk unggulan Desa Mojomalang adalah bengkoang yang mana panen raya bengkoang jatuh pada Bulan Maret sampai dengan Bulan April setiap tahunnya dengan populasi 70% dari total lahan pertanian yang ada di Desa Mojomalang. Hasil pertanian Bengkoang dijual tanpa adanya proses olahan. Sesuai dengan konsep *Local Economic Development* (LED), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004:120). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Melalui konsep *collaborative governance*, pemerintah Desa Mojomalang berupaya meningkatkan perekonomian Desa Mojomalang melalui UMKM yang dimiliki desa dan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami sesuatu yang berasal dari masalah sosial, penelitian ini juga mengamati manusia dan interaksi yang terjadi dengan orang lain maupun dengan lingkungannya, memperoleh pendapat dan pengalaman mereka untuk dijadikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui survey, observasi dan wawancara lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menggunakan model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007). Penelitian ini menggunakan model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2007) yaitu 1) *face to face dialog*; 2) *trust building*; 3) *commitment to process*; 4) *share understanding*; 5) *intermediate outcome*. Sedangkan faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* adalah 6) *starting condition*; 7)

*institutional design*; dan 8) *facilitative leadership*. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa *collaborative governance* menjadi konsep penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mojomalang dalam rangka meningkatkan perekonomian desa melalui penguatan UMKM. Aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah desa lebih pada aspek perumusan dan implementasi kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Sehingga dalam prakteknya, kolaborasi penyelenggaraan pemerintah dapat dikatakan kurang deliberatif atau musyawarah antar aktor / stakeholders yang seharusnya terlibat. Adapun aktor atau *stakeholders* yang terlibat di dalam upaya peningkatan ekonomi di Desa Mojomalang adalah pemerintah desa, pelaku UMKM, pengelola BUMDes dan masyarakat. Rekomendasi dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah mengembangkan potensi desa yang melibatkan *stakeholders* dengan diseminasi. Pengetahuan mengenai pengolahan produk unggulan dan penggunaan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi UMKM.

Dampak pandemi global sejak tahun 2019 sangat berpengaruh signifikan pada kondisi masyarakat Indonesia di bidang kesehatan dan ekonomi. Sesuai dengan hasil penelitian Mubasyiroh et al (2018) berjudul Indeks Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia bahwa: 1) adanya kesenjangan dari supply tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan di perkotaan dan perdesaan; dan 2) terdapat kesenjangan dari faktor *supply*, *demand*, dan *barrier* antar perkotaan dan perdesaan, dan juga antara daerah miskin dan non-miskin. Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai Desa, dan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Beberapa peraturan tersebut menghasilkan 3 program prioritas dari Pemerintah yakni Kebijakan Dana Tanggap Covid-19, Kebijakan BLT Dana Desa, dan Kebijakan Padat Karya Tunai Desa. Beberapa program prioritas tersebut bertujuan dalam penanggulangan kesehatan warga, jaringan pengaman warga miskin, dan kebangkitan ekonomi

desa pada masa pandemic Covid-19. Sampai pada masa pasca pandemi atau endemi saat ini, pemerintah khususnya pemerintah desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat berupaya terus dalam penanganan membangkitkan ekonomi. Berbagai macam program yang telah disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah diupayakan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Salah satu bentuk dari Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (program prioritas pandemic Covid-19) adalah pengembangan usaha kecil dan menengah.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat relevan dilakukan di Indonesia baik di daerah perkotaan dan perdesaan. Struktur usaha di Indonesia selama ini sebenarnya bertumpu pada industri kecil / industri rumah tangga / industri menengah, tetapi kondisi dari segi nilai tambah maupun keuntungan yang dapat diraih sangat kecil. Hal ini dikarenakan industri kecil/rumah tangga/menengah tersebut lebih banyak memakai bahan baku atau bahan antara (*intermediate goods*) dari dalam negeri sehingga tidak membenahi nilai impor. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompoknya. Secara konsep, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Adapun manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional adalah dapat membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto, salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Sedangkan manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa lebih spesifik yaitu untuk meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, mempererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju.

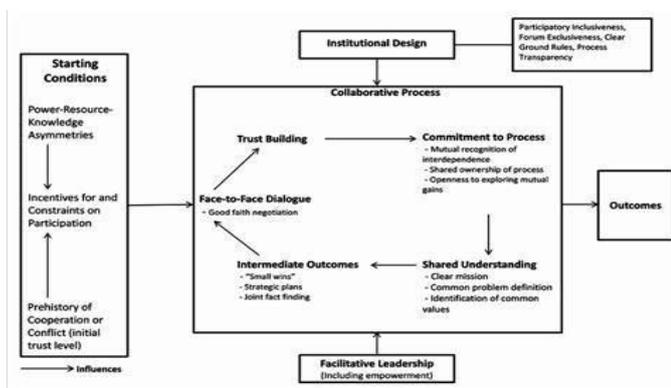
Desa Mojomalang merupakan salah satu desa di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban yang memiliki empat dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Genengan, Dusun Dawung dan Dusun Alastuwo. Desa Mojomalang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.576 jiwa (per Bulan Oktober 2020)

dengan persebaran di Dusun Krajan sebanyak 1.558 jiwa, di Dusun Alastuwo sebanyak 1.084 jiwa, di Dusun Genengan sebanyak 980 jiwa dan di Dusun Dawung sebanyak 954 jiwa. Berdasarkan data pemerintah desa, mata pencaharian penduduk Desa Mojomalang cukup beragam, dengan mayoritas penduduk mengurus rumah tangga (11%), wiraswasta (9%), pegawai negeri sipil (9%), belum/tidak bekerja (9%), buruh tani/perkebunan (9%), pelajar/mahasiswa (7%), buruh harian lepas (6%), karyawan swasta (6%), Tentara Nasional Indonesia/TNI (6%), dan lainnya (28%), (Pemerintah Desa Mojomalang Dalam Angka, 2020). Produk unggulan Desa Mojomalang adalah bengkoang yang mana panen raya bengkoang jatuh pada Bulan Maret sampai dengan Bulan April setiap tahunnya dengan populasi 70% dari total lahan pertanian yang ada di Desa Mojomalang. Hasil pertanian Bengkoang dijual tanpa adanya proses olahan. Sesuai dengan konsep *Local Economic Development* (LED), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudrajat, 2004:120). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Melalui konsep *collaborative governance*, pemerintah Desa Mojomalang berupaya meningkatkan perekonomian Desa Mojomalang melalui UMKM yang dimiliki desa dan masyarakat.

*Collaborative Governance* merupakan pemerintahan yang disusun dengan melibatkan badan publik dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik, serta asset publik (Chris Ansel & Alison Gash, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh pada tahun 2011, mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses dan struktur pembuatan kebijakan publik dan manajemen yang mengajak personal di luar lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan atau masyarakat, swasta, dan sipil dalam rangka mencapai tujuan publik Ansel dan Gash (2007) juga menetapkan 6

Kriteria penting untuk mendefinisikan Kolaborasi Governance: a) Forum di inisiasi oleh badan *public*; b) Peserta forum termasuk organisasi non pemerintah; c) Peserta terlibat dalam pengambilan kebijakan bukan hanya berperan konsultasi saja; d) Forum tersebut bersifat formal dan merupakan rapat bersama; e) Forum tersebut bertujuan mencari mufakat atas kebijakan (walaupun dalam prakteknya mufakat tidak selalu dilakukan); f) Fokus dari kolaborasi adalah kebijakan publik dan pengelolaan publik. Ansell & Gash memodelkan *collaborative governance* sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007)**



Sumber: Ansell&Gash, 2007

Kolaborasi di Desa Mojomalang telah berlangsung sejak lama, masyarakat dan perangkat desa mengenal dengan istilah gotong royong atau swadaya (Rosidin, 2019). Istilah tersebut merupakan wujud dari kolaborasi antara penduduk desa dan pemerintah, walaupun dapat diketahui tingkatan kolaborasinya dapat berbeda – beda. Namun secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gotong royong atau swadaya tersebut, diikuti oleh seluruh penduduk desa dalam forum atau kegiatan yang secara tradisional dan kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dan mufakat. Sehingga dapat dipastikan masyarakat dan perangkat desa juga secara swadaya akan urun atau ikut andil dalam memutuskan dan melaksanakan kegiatan yang telah disepakati. Menurut Sujadi, Kepala Desa Mojomalang bahwa “Kontribusi aktor dalam pembangunan desa bisa dicontohkan pada musyawarah desa tahunan (Musrenbangdes), seperti biasa kami mengundang beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun, kepala RT, RW dan bidan dan yang lain. Akan tetapi kegiatan tersebut belum maksimal karena masyarakat hanya ikut saja atau berfikir

program kegiatan itu given dari kabupaten.” Adapun beberapa aktor / *stakeholders* yang terlibat dalam penyusunan program dan kegiatan perekonomian desa adalah pemerintah desa, pelaku UMKM, BUMDes, masyarakat dan perguruan tinggi.

Fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan *collaborative governance* dalam peningkatan perekonomian Desa Mojomalang melalui penguatan UMKM(Sun’an, 2015). Penelitian ini menggunakan model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2007) yaitu 1) *face to face dialog*; 2) *trust building*; 3) *commitment to process*; 4) *share understanding*; 5) *intermediate outcome*. Sedangkan faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* adalah 6) *starting condition*; 7) *institusional design*; dan 8) *fasilitative leadership*. Dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, belum ada yang meneliti pelaksanaan *collaborative governance* di Desa Mojomalang khususnya pada program peningkatan perekonomian. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah analisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam peningkatan perekonomian Desa Mojomalang melalui penguatan UMKM.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2012). Pemilihan metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami sesuatu yang berasal dari masalah sosial, penelitian ini juga mengamati manusia dan interaksi yang terjadi dengan orang lain maupun dengan lingkungannya, memperoleh pendapat dan pengalaman mereka untuk dijadikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui survey, observasi dan wawancara lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menggunakan model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Collaborative governance* Desa Mojomalang melalui Pemerintah Desa untuk dapat memperhatikan aspirasi dan masyarakat desa, UMKM dan *stakeholders* lainnya untuk berkolaborasi dalam pembangunan. Adapun beberapa aktor / *stakeholders* yang terlibat dalam penyusunan program dan kegiatan perekonomian desa adalah pemerintah desa, pelaku UMKM,

BUMDes, masyarakat dan perguruan tinggi. Pemerintah Desa Mojomalang pernah berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM desa melalui anggaran pemerintah daerah dan pemerintah desa. Tetapi pelatihan tersebut tidak berjalan secara berkesinambungan, hanya 2 kali selama tahun 2021. Kondisi UMKM Desa Mojomalang masih berjalan secara tradisional dan belum ada Lembaga khusus yang menangani di desa. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga usaha desa tergolong masih vakum dan masih proses penentuan jati diri apakah bergerak di bidang usaha, pariwisata atau bidang lainnya. Sehingga peran dalam penanganan UMKM Desa Mojomalang belum terealisasi secara baik. Sejak tahun 2018, Desa Mojomalang mulai terbuka untuk menerima mahasiswa KKN dan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pengembangan desa. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan salah satu universitas yang memiliki kontribusi dalam bentuk riset dan pendampingan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Namun pendampingan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendampingi UMKM. Masyarakat Desa Mojomalang memiliki peran yang sentral dalam peningkatan perekonomian melalui penguatan UMKM. Melalui survey lapangan, ada 70 UMKM yang terdaftar sebagai calon penerima bantuan bagi usaha mikro. Berikut merupakan pelaksanaan *collaborative governance* dalam peningkatan perekonomian Desa Mojomalang melalui penguatan UMKM.

### 1. *Face to Face Dialog*

*Face to face dialog* atau pertemuan tatap muka secara langsung dengan berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut, untuk membahas suatu kepentingan bersama. Dialog secara langsung di Desa Mojomalang sudah terlembaga dengan baik, hal ini dilaksanakan secara berkala / rutin di balai desa. 70 UMKM tidak semuanya diundang dan hadir secara bersamaan, ada rapat rutin yang dilakukan berkala bersamaan dengan perkumpulan lingkup RT, PKK, dan Arisan Muda Mudi. Menurut Bapak Joko selaku kepala desa, pertemuan UMKM belum maksimal karena belum ada paguyuban atau lembaga khusus yang menangani UMKM. BUMDes

pun masih belum maksimal karena masih dalam proses pencarian jati diri usaha desa.

### 2. *Trust Building*

Membangun kepercayaan bagi para aktor kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM memiliki usaha dan waktu yang sangat besar. Trust building dimulai dengan membangun komunikasi yang baik antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan peningkatan kapasitas UMKM. Hubungan antar lembaga di pemerintah desa, UMKM, masyarakat dan akademisi yang baik sangat mendukung upaya saling membangun kepercayaan. Lembaga tersebut membangun kepercayaan dengan tidak pernah membedakan anggota atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. Biasanya untuk menjaga agar ada pertemuan berkala setiap bulan, selalu diadakan pertemuan yang di dalamnya dilakukan kegiatan arisan kampung. Di dalam kegiatan tersebut, selalu ada waktu untuk tokoh atau pimpinan masyarakat menginformasikan kebijakan pemerintah daerah, kabupaten, maupun desa dan warga juga di beri waktu untuk mengemukakan pendapatnya pada sesi selanjutnya. Keterbukaan informasi dan penggalian informasi ini menjadi kunci untuk membina kepercayaan. Dan hal pokok lainnya adalah komitmen Pemerintah Desa Mojomalang untuk transparan dan bertanggungjawab. Pemerintah Desa selalu melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam suatu kepanitian kegiatan dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian Desa Mojomalang.

### 3. *Commitment to Process*

*Comitment to process* adalah komitmen atau kesepakatan oleh beberapa pihak untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. *Stakeholders* yang ada di Desa Mojomalang saling berbagikomitmen untuk mengatasi permasalahan dan solusi bahwa proses yang dilaksanakan merupakan proses milik bersama dan saling terbuka. Akan tetapi, program dan kegiatan yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masih tergolong belum maksimal. Banyak pelaku UMKM yang berkurang dari hari ke hari dalam partisipasi pelaksanaan pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan padahal mendapat *support* oleh dinas terkait dan akademisi. Pada *event-event* tertentu misalnya acara lomba peringatan kemerdekaan atau bersih desa, pelaku

UMKM dan warga yang lain bergotong royong dan swadaya. Dalam kepanitian penyelenggaraan tersebut Pemerintah Desa bersama – sama dengan pelaku UMKM dan masyarakat.

#### 4. *Share Understanding*

Desa Mojomalang beserta masyarakat memiliki pemahaman dan pengertian bahwa proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara mufakat. Pemerintah Desa Mojomalang berupaya menjalin komunikasi dan memberikan informasi secepat dan seterbuka mungkin kepada masyarakat. Dalam rapat dan pertemuan rutin RT dan RW selalu ada pemberian informasi dan peserta selalu dimintai pendapatnya sehingga terbina pengertian dan pemahaman, selanjutnya dapat diambil mufakat untuk memutuskan suatu permasalahan tertentu dengan kata lain terjadi musyawarah mufakat. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Desa adalah memotivasi ke lembaga kemasyarakatan sehingga baik kelem-bagaan formal maupun informal yang ada di Desa Mojomalang, masing-masing saling menjalin hubungan untuk dapat beraktifitas guna mendukung kegiatan Pemerintah Desa.

#### 5. *Intermediate Outcome*

*Intermediate outcome* merupakan hasil-hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung dan memberikan manfaat strategis. Hasil tersebut dapat dilihat dari kegiatan desa yang meliputi Upacara Adat Bersih Desa dan beberapa *workshop* pengembangan UMKM dan penguatan BUMDes yang diselenggarakan oleh Desa Mojomalang. Acara tersebut memberi manfaat secara sosial budaya dan juga manfaat ekonomi. *Event* tersebut, berdampak pada keramaian yang mampu menciptakan peluang usaha berjualan dan meningkatkan pendapatan warga desa.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* terdiri dari *starting condition*, *institutional design* dan *facilitative leadership*. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut

#### 6. *Starting Condition*

*Starting condition* merupakan kondisi awal dimana *collaborative governance* dilaksanakan yaitu meliputi kerjasama antar *stakeholder* dan analisis potensi desa untuk bekal proses *collaborative governance*. Kerjasama yang dilaksanakan memiliki kebiasaan dengan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah

dan melaksanakan hasil musyawarah dengan gotong royong serta swadaya, dua kekuatan inilah yang menjadi kunci suksesnya pembangunan Desa Mojomalang. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, belum ada konflik yang terjadi di Desa Mojomalang.

#### 7. *Institutional Design*

*Institutional design* merupakan, bagaimana forum *collaborative governance* itu di desain, partisipasi masyarakat, forum dihadiri oleh anggota, mempunyai aturan yang jelas, dan prosesnya terbuka. Desa Mojomalang memiliki kepengurusan tetap yang ditetapkan oleh Kepala Desa. anggota yang tergabung dalam struktur Desa Mojomalang mewakili lembaga kemasyarakatan atau lembaga pemerintahan tertentu, hal ini diharapkan kinerja organisasi lebih efektif. Dalam melaksanakan kegiatan desa, pemerintah desa dan Pengurus Desa Mojomalang membentuk kepanitian yang bersifat terbuka. Biasanya dari pihak pemerintah desa hanya menempatkan satu atau dua orang personil supaya mengawal agar pelaksanaan kegiatan tertib secara administrasi dan dari komponen masyarakat terdiri dari berbagai macam unsur sesuai kebutuhan, misalnya karang taruna, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya.

#### 8. *Facilitative leadership*

Budaya kepemimpinan Desa Mojomalang masih ada unsur paternalistik dimana aparat Pemerintah Desa Mojomalang mempunyai komitmen untuk selalu transparan dan partisipatif hal ini merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah Desa bersama – sama dengan pengelola desa membentuk kepanitiaan dalam setiap kegiatan. Aparat Pemerintah Desa tidak pernah berusaha mendominasi kepanitian tersebut. Walaupun hanya menempatkan seorang atau dua orang personil dalam kepanitiaan. Sebagai seorang pemimpin yang melaksanakan *collaborative governance* di Desa Mojomalang harus mempunyai legitimasi sebagai pemimpin informal yang mempunyai serangkaian kemampuan, kewibawaan, komitmen, ketokohan, kemampuan organisasi, dan keaktifan melaksanakan keputusan. Ketokohan dibentuk dengan sejarah panjang nenek moyang yang selalu dijaga dalam berbagai urusan di desa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan model *Collaborative Governance* Ansel dan Gash (2007) yaitu 1) *face to face dialog*; 2) *trust building*; 3) *commitment to process*; 4) *share understanding*; 5) *intermediate outcome*. Sedangkan faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* adalah 6) *starting condition*; 7) *institutional design*; dan 8) *facilitative leadership*. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa *collaborative governance* menjadi konsep penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mojomalang dalam rangka meningkatkan perekonomian desa melalui penguatan UMKM. Aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah desa lebih pada aspek perumusan dan implementasi kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Sehingga dalam prakteknya, kolaborasi penyelenggaraan pemerintah dapat dikatakan kurang deliberatif atau musyawarah antar aktor / *stakeholders* yang seharusnya terlibat. Adapun aktor atau *stakeholders* yang terlibat di dalam upaya peningkatan ekonomi di Desa Mojomalang adalah pemerintah desa, pelaku UMKM, pengelola BUMDes dan masyarakat. Rekomendasi dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah mengembangkan potensi desa yang melibatkan *stakeholders* dengan diseminasi. Pengetahuan mengenai pengolahan produk unggulan dan penggunaan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi UMKM.

## REFERENCES

- Chris Ansell and Alison Gash. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Berkeley: University of California, 2007
- Hariyoko, Yusuf. (2019). Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. DOI: 10.47441/jkp.v16i2.180. 197-206
- Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, An Integrative Framework for Collaborative Governance, *Jurnal of Public Administration Research and Theory*, 2011.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan pembangunan daerah : reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang. Jakarta: Erlangga
- Mafaza, Ardhia & Kristina Setyowati. (2020). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*. 7-12
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Rosidin. 2019. PEMBERDAYAAN Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Bandung: Pustaka Setia
- Sambodo, Giat Tri dkk. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*. DOI: <https://doi.org/10.18196/jgpp.v3i1.2140>. 94-123
- Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sun'an. 2015. Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai Desa
- Utami, Aninda Diah Maharani dkk. (2021). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. DOI:10.14710/jppmr.v10i3.31412.
- Yasinta, Putu Nomy. (2019). Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 2-23

